

ABSTRAK

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri, semua itu dilakukan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu keinginan pelaku usaha berdampak pada pengguna tabung gas elpiji. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen Yang Di Tangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi dan solusinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori sistem hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penegakan hukum terhadap perkara pidana pengalihan gas pada tabung gas bersubsidi ke tabung gas non subsidi yang dilakukan oleh Polisi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dimulai dari adanya laporan dari masyarakat atau temuan sendiri dari polisi, selanjutnya diturunkan surat tugas untuk melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan gelar perkara untuk memulai adanya penyidikan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengalihan gas mengalami beberapa kendala yang dilihat dari sistem hukum, struktur, substansi, dan kultur hukum. Solusinya adalah Memberikan sanksi dari tindak pidana pengalihan gas, agar pelaku memiliki efek jera dan tidak membuat tindak pidana pengalihan gas terjadi kembali. Dalam hal terjadi pengalihan tabung gas elpiji yang merugikan masyarakat banyak, maka masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Seperti kasus pengalihan tabung gas elpiji yang dibahas sebelumnya, masyarakat melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and or marketing activities of goods and or services carried out in a way that is not honest or against the law or impedes business competition. By various ways businesses modify sales methods, goods (gas cylinders) and even the contents of the gas cylinders themselves, all of this is done to achieve one goal, therefore the desires of business actors have an impact on LPG gas cylinder users. The formulation of the problem in this study are: law enforcement against business actors transfer / transfer of LPG gas cylinders to subsidies to non-subsidies in accordance with the Law on Legal Metrology and Consumer Protection that is handled by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Central Java Regional Police and Barriers faced by the Directorate of Investigation Central Java Police Special Crimes against business actors transfer / transfer of LPG gas cylinders to non-subsidized subsidies and the solution. The method used by the researcher is the juridical normative legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with the Central Java Regional Police Directorate of Criminal Investigation. And secondary data obtained from literature studies relating to the theory of the legal system. Based on the results of research that law enforcement against criminal cases of transfer of gas in subsidized gas cylinders to non-subsidized gas cylinders conducted by the Central Java Regional Police Special Criminal Investigation Directorate begins with a report from the community or the police's own findings, then a letter of assignment is issued to carry out investigation, then carried out a case to start the investigation. In the implementation of law enforcement, the crime of gas diversion experiences several obstacles as seen from the legal system, structure, substance, and legal culture. The solution is to provide sanctions from the gas diversion crime, so that the perpetrators have a deterrent effect and do not make the gas diversion crime occur again. In the event that LPG cylinder can be moved to the detriment of the public at large, the community who feels disadvantaged can make a complaint to the authorities. Like the LPG cylinder tube transfer case discussed earlier, the public made a complaint to the police to be followed up. Employees of Government agencies assigned to guide Legal Metrology who conduct surveillance and observation are required to investigate the criminal acts specified in this Law. Investigations are conducted according to procedures determined by the applicable Criminal Procedure Code. The Government terminates certain activities that cause consumer losses.

Keywords : Law Enforcement, Business Actors, Legal Metrology, Consumer Protection